



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Renja – PD Tahun 2023 merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- (2) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu
BAB III	:	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	:	Penutup

- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Renja – PD Tahun 2023 terdiri dari Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- b. Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- h. Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Blitar;

- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- w. Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- aa. Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;
- bb. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar; dan
- dd. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama

DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 4 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2023

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2023 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2023, berpedoman pada RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, Renstra Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2020-2024, Renstra Biro Organisasi serta Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2022 dan tahun 2023;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
26. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

27. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.

Tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2023;
- Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; serta
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2023 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023, dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Sub Bab ini disajikan Review atas hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2021) dan perkiraan pencapaian realisasi Rencana Kerja pada tahun berjalan (2022) sesuai dengan APBD Tahun 2022. Berkenaan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah didasarkan pada realisasi atas Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Adapun Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2 Tahun Rencana) adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sedangkan Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-1 Tahun Rencana) adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	BAGIAN PEMERINTAHAN									
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	100 %	-	-	-	-	42,86 %	42,86 %	42,86
2.13.04.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	21 kelurahan	-	-	-	-	17 kelurahan	17 kelurahan	80,95
2.13.04.02.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi penyusunan profil	21 kelurahan	-	-	-	-	21 kelurahan	21 kelurahan	100,00
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	-	-	-	-	66,67 %	66,67 %	66,67
4.01.02.02.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %	-	-	-	-	67 %	67 %	67,00
		Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah jenis dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tersusun	3 Jenis Dokumen	-	-	-	-	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	100,00
		Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	3 Koordinasi	-	-	-	-	3 Koordinasi	3 Koordinasi	100,00
		Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	500 Orang	-	-	-	-	500 Orang	500 Orang	100,00
4.01.02.02.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah jenis fasilitasi penyelenggaraan administrasi kewilayahan	3 Fasilitasi	-	-	-	-	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100,00
		Jumlah peserta rakor kewilayahan	500 Orang	-	-	-	-	500 Orang	500 Orang	100,00
		Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	66,67
		Jumlah jenis laporan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan TTG	2 Jenis Laporan	-	-	-	-	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	100,00
		Jumlah jenis laporan penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Jenis Laporan	-	-	-	-	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	100,00
4.01.02.02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan pertanggungjawaban yang disusun	1 jenis dokumen	-	-	-	-	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100,00
		Jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah	3 jenis koordinasi	-	-	-	-	3 jenis koordinasi	3 jenis koordinasi	100,00

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	-	-	-	-	6 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	100,00
4.01.02.02.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	6 draft	-	-	-	-	6 draft	6 draft	100,00
		jumlah event keagamaan yang terfasilitasi	10 event	-	-	-	-	10 event	10 event	100,00
		Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi	1738 orang	-	-	-	-	1738 orang	1738 orang	100,00
		Jumlah lembaga kegamaan yang terfasilitasi melalui hibah	5 lembaga	-	-	-	-	5 lembaga	5 lembaga	100,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan	-	-	-	-	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	100,00
4.01.02.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial	2 draft	-	-	-	-	2 draft	2 draft	100,00
4.01.02.02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat	2 draft	-	-	-	-	2 draft	2 draft	100,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	-	-	-	-	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	100,00
4.01.03.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Draft Rumusan Kebijakan	-	-	-	-	2 Draft Rumusan Kebijakan	2 Draft Rumusan Kebijakan	100,00
4.01.03.02.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Operasi Bersama pemberantasan Cukai Ilegal	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00
4.01.03.02.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomian	4 Draft Rumusan Kebijakan	-	-	-	-	4 Draft Rumusan Kebijakan	4 Draft Rumusan Kebijakan	100,00
4.01.03.02.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	90 %	-	-	-	-	80 %	80 %	88,89
4.01.03.02.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		Jumlah Pemberian BLT kepada Buruh Pabrik Rokok	577 orang	-	-	-	-	577 orang	577 orang	100,00
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	90 %	-	-	-	-	35 %	35 %	38,89
4.01.03.02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	-	-	-	-	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	100,00
4.01.03.02.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perhubungan, kehutanan dan	6 draft rumusan kebijakan	-	-	-	-	6 draft rumusan kebijakan	6 draft rumusan kebijakan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan								
4.01.03.02.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
		Jumlah draf rumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan	4 Draft Rumusan Kebijakan	-	-	-	-	4 Draft Rumusan Kebijakan	4 Draft Rumusan Kebijakan	100,00
4.01.03.02.02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAIK Nilai (84,00)	-	-	-	-	BAIK Nilai (81,50)	BAIK Nilai (81,50)	97,02
		Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	9/9 Nilai	-	-	-	-	4/9 Nilai	4/9 Nilai	44,44
4.01.03.02.02.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang di fasilitasi	80 Paket	-	-	-	-	80 Paket	80 Paket	100,00
4.01.03.02.02.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Penyedia) berdasarkan Jenis Pengadaan	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100,00
4.01.03.02.02.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	4 Jenis	-	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100,00
	BAGIAN ORGANISASI									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	100 %	-	-	-	-	55,17 %	55,17 %	55,17
4.01.03.02.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	-	-	-	-	20 OPD	20 OPD	66,67
4.01.01.02.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah jabatan yang memenuhi standar jabatan (Anjab, ABK, SKJ dan Evaluasi Jabatan)	1700 Jabatan	-	-	-	-	1700 Jabatan	1700 Jabatan	100,00
		Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	2 Kebijakan	-	-	-	-	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.02.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah jenis Dokumen Penerapan Kinerja Pemda yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		Jumlah OPD sampling evaluasi SAKIP tingkat KemenPAN RB	30 OPD	-	-	-	-	23 OPD	23 OPD	76,67
		Jumlah OPD yang telah menyusun rencana kerja reformasi birokrasi sesuai ketentuan	30 OPD	-	-	-	-	21 OPD	21 OPD	70,00
		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	10 OPD	-	-	-	-	6 OPD	6 OPD	60,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	48,28 %	-	-	-	-	20,69 %	20,69 %	42,85
4.01.01.02.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	-	-	-	-	20 OPD	20 OPD	66,67
4.01.01.02.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang hasil survey IKM nya berpredikat sangat baik	10 OPD	-	-	-	-	6 OPD	6 OPD	100,00
		Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	30 OPD	-	-	-	-	29 OPD	29 OPD	96,67
		Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	30 OPD	-	-	-	-	26 OPD	26 OPD	86,67
		Jumlah OPD yang telah menyusun proses bisnis	30 OPD	-	-	-	-	20 OPD	20 OPD	66,67
		Jumlah OPD calon peserta kompetisi inovasi pelayanan publik	4 OPD	-	-	-	-	4 OPD	4 OPD	100,00
		Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	8 OPD	-	-	-	-	6 OPD	6 OPD	75,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK (90,00)	-	-	-	-	BAIK (86,00)	BAIK (86,00)	95,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	10 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00
4.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribulan, Renaksi dan Monev Renaksi)	7 Dokumen	-	-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00
4.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 event	-	-	-	-	5 event	5 event	100,00
		Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	84 Orang	-	-	-	-	84 Orang	84 Orang	100,00
	BAGIAN UMUM									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.02.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
4.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	1 Jenis	-	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100,00
4.01.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	-	-	-	0 Unit	0 Unit	100,00
4.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 Jenis	-	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100,00
4.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 Rekening	-	-	-	-	4 Rekening	4 Rekening	100,00
4.01.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	6 Jenis	-	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100,00
4.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	60 Orang	-	-	-	-	60 Orang	60 Orang	100,00
4.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaraan Jabatan yang terbayarkan pajaknya	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100,00
4.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	21 Unit	-	-	-	-	21 Unit	21 Unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Pajak kendaraan dinas Operasional yang terbayarkan pajaknya	65 Unit	-	-	-	-	65 Unit	65 Unit	100,00
4.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100,00
		Jumlah rumah dinas yang terpelihara	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100,00
4.01.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	12 Jenis	-	-	-	-	12 Jenis	12 Jenis	100,00
4.01.01.02.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
4.01.01.02.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23 Jenis	-	-	-	-	23 Jenis	23 Jenis	100,00
4.01.01.02.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	2 Fasilitasi	-	-	-	-	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100,00
4.01.01.02.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100,00
4.01.01.02.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.02.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terfasilitasi	4 Fasilitasi	-	-	-	-	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	100,00
4.01.01.02.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	4 Fasilitasi	-	-	-	-	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	100,00
4.01.01.02.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	12 Fasilitasi	-	-	-	-	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	100,00
4.01.01.02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	-	-	-	-	80 %	80 %	100,00
4.01.01.02.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitas upacara sesuai standar keprotokolan	9 Upacara	-	-	-	-	9 Upacara	9 Upacara	100,00
		Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan	24 penerimaan	-	-	-	-	24 penerimaan	24 penerimaan	100,00
4.01.01.02.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan Pimpinan Daerah Yang disusun	400 Naskah	-	-	-	-	400 Naskah	400 Naskah	100,00
4.01.01.02.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Baliho	25 Unit	-	-	-	-	25 Unit	25 Unit	100,00
		Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Foto	3000 Unit	-	-	-	-	3000 Unit	3000 Unit	100,00
		Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Spanduk	30 Unit	-	-	-	-	30 Unit	30 Unit	100,00
4.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK (90,00)	-	-	-	-	BAIK (86,00)	BAIK (86,00)	95,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 Jenis	-	-	-	-	25 Jenis	25 Jenis	100,00
4.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	100,00
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	100,00
4.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	23 Jenis	-	-	-	-	23 Jenis	23 Jenis	100,00
4.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	2950 Dos	-	-	-	-	2950 Dos	2950 Dos	100,00
		Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	2188 Porsi	-	-	-	-	2188 Porsi	2188 Porsi	100,00
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	51 Jenis	-	-	-	-	51 Jenis	51 Jenis	100,00
4.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	16 Jenis	-	-	-	-	16 Jenis	16 Jenis	100,00
		Jumlah lembar penggandaan	50000 Lembar	-	-	-	-	50000 Lembar	50000 Lembar	100,00
4.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100,00
4.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia	0 Dos	-	-	-	-	0 Dos	0 Dos	100,00
		Jumlah porsi mamin yang tersedia	0 Porsi	-	-	-	-	0 Porsi	0 Porsi	100,00
		Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	130 Rakor	-	-	-	-	130 Rakor	130 Rakor	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perangkat daerah sesuai standar								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00

Jika disandingkan dengan pencapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021 maka dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.2

Ketercapaian Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
1	URUSAN PENUNJANG/ SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	99,65%	6		114,22%	19		109,44%
		Administrasi Tata Pemerintahan			2	100,00%				
		Penataan Administrasi Pemerintahan						2	100,00%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1	100,00%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						2	100,00%	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah			1	115,38%				
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						2	158,33%	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1	141,49%				
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						3	112,04%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum						2	100,00%	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						2	90,00%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			2	100,00%				
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						4	174,55%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						1	50,00%	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4	73,69%	4		87,33%	15		109,54%
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1	66,67%				
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						1	200,00%	

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						1	0,00%	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						1	150,00%	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			1	100,00%				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						2	99,30%	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1	100,00%				
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						2	150,00%	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						2	125,00%	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1	82,65%				
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						2	82,65%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						4	69,34%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12	99,17%	15		107,85%	63		93,41%
		Penataan Organisasi			3	99,50%				
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						3	100,00%	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						1	100,00%	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						5	100,00%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	100,00%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1	100,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1	100,00%	

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1	50,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1	100,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1	100,00%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						1	100,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1	100,00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1	100,00%	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1	100,00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1	100,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1	150,00%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						1	125,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	100,00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1	100,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1	100,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1	100,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1	100,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2	79,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1	100,00%	

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3	62,70%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	100,00%				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1	100,00%	
		Pengadaan Mebel						1	100,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1	100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	100,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1	100,00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1	16,67%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2	50,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	150,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2	66,92%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2	50,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1	100,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2	100,00%	

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1	100,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1	100,00%	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1	123,08%	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1	100,00%	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1	100,00%	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1	100,00%				
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1	100,00%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1	100,00%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						1	100,00%	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1	102,50%				
		Fasilitasi Keprotokolan						2	128,47%	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						2	53,00%	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan						8	74,92%	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	105,26%	1		100,00%	3		100,00%
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang			1	100,00%				

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
		Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						1	100,00%	
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						1	100,00%	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						1	100,00%	

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari total 4 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2021, yang tercapai sesuai target atau melebihi target masih 1 Program yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sehingga perlu dilaksanakan perbaikan-perbaikan terkait pelaksanaan 3 Program lainnya, antara lain :
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Sesuai kondisi bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan belum sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sehingga terjadi kesulitan data dukung pada saat penyusunan LPPD, sehingga kedepan perlu dilakukan langkah lebih pro aktif lagi dalam mengkoordinasikan antar OPD pelaksana urusan sehingga bisa memenuhi data dukung LPPD
 - Belum Optimalnya Pembinaan terhadap Tempat Ibadah yang representatif pada tahun 2021 maka kedepan perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap tempat ibadah yang representatif sehingga bisa memenuhi 4 (empat) kriteria tempat ibadah representatif yaitu:
 1. Digunakan untuk jamaah minim 3 kali sehari (Ibadah Umat Islam)
 2. Terdapat pengurus Tempat Ibadah
 3. Digunakan sebagai tempat pengajaran (pengajian, mengaji, majelis taklim)
 4. Memiliki Sarana Prasarana yang memadai (Ruang Ibadah, Tempat Wudhu, Toilet)
 - Sebagai Perangkat Daerah belum memahami peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Daerah sehingga perlu melaksanakan sosialisasi peran dan fungsi Setda secara masif
 - Adanya kewajiban menyesuaikan dengan peraturan perundangan diatasnya sehingga ada peraturan kebijakan yang tidak bisa terbit sehingga kedepan perlu penyusunan kebijakan yang mendukung urusan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berimbang serta mengikuti perkembangan peraturan perundangan diatasnya.
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Disebabkan penyesuaian yang terlambat terhadap kebijakan pengelolaan DBHCHT sesuai bidang yang telah ditetapkan maka pada tahun 2022 perlu dilakukan pemetaan kembali dan perubahan

alokasi DBHCHT sesuai dengan aturan PMK No : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT

- Disebabkan OPD belum taat sepenuhnya terhadap syarat-syarat tertib administrasi pembangunan yaitu:
 1. mengentry rencana target realisasi kegiatan dan anggaran pada aplikasi SIRUP sebelum tahun anggaran berjalan
 2. mengentry realisasi fisik kegiatan segera setelah BA PPHP ditandatangani
 3. merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang direncanakan
 4. belum ada kebijakan sanksi and punishment jika OPD tidak tertib administrasi pembangunan
 maka perlu dilakukan langkah perbaikan yakni :
 1. meningkatkan kualitas monitoring, pelaporan dan pembinaan administrasi pembangunan secara berkala
 2. mengintegrasikan sistem realisasi fisik dengan realisasi keuangan di BPKAD serta pengukuran kinerja di Bappeda sehingga bisa lebih efisien dan efektif
 3. perlu dirumuskan adanya reward and punishment sehingga OPD lebih tertib administrasi pembangunan

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Dilatarbelakangi peraturan perundangan terkait penataan organisasi yang relatif sering berubah belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi di daerah, maka kedepan perlu lebih fokus dalam melaksanakan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Instruksi Kemendagri serta dilakukan penyesuaian output sub kegiatan sesuai dengan bentuk organisasi yang baru
- Melaksanakan inventarisasi dan penjadwalan yang lebih baik lagi terhadap penyusunan data dan monev kinerja secara teratur sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan.

2. Dari total 22 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2021 terdapat 3 kegiatan yang capaiannya dibawah target yakni :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 Disebabkan penyesuaian yang terlambat terhadap kebijakan pengelolaan DBHCHT sesuai bidang yang telah ditetapkan maka pada tahun 2022 perlu dilakukan pemetaan kembali dan perubahan alokasi

DBHCHT sesuai dengan aturan PMK No : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT

2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Disebabkan oleh masih banyaknya kesalahan OPD dalam mengentry RUP, minimnya pemahaman OPD terkait pengadaan Barjas melalui e-procurement serta pengadaan OPD rata-rata masih menggunakan metode Pengadaan Langsung , maka perlu dilakuka Pembinaan dan komunikasi dua arah yang intensif antara tim pengadaan dengan Perangkat Daerah

3. Kegiatan Penataan Organisasi

- Adanya perubahan regulasi yang terus menerus terkait aturan ikutan Penyederhanaan Birokrasi sehingga membuat daerah harus segera mengambil kebijakan yang cepat melalui :
 - a. koordinasi yang intensif baik antar Tim Kota, Provinsi maupun KemenPAN dan Kemendagri serta peningkatan pendampingan OPD dalam rangka penguatan organisasi, penerapan SAKIP, RB, tata laksana dan pelayanan publik
 - b. perlu penyesuaian indikator kinerja sehingga sesuai dengan cascading kinerja, tugas dan fungsi organisasi serta pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan KMDN 050-5889 Tahun 2021
- Dari hasil evaluasi SAKIP 29 OPD terdapat 28 OPD mendapatkan predikat nilai pelaporan kinerja minimal memuaskan sedangkan masih ada 1 OPD yang mendapatkan predikat baik sehingga kedepan perlu dilakukan pendampingan intensif terkait aturan dan teknis penyusunan laporan kinerja yang baik

3. Dari total 61 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah rata-rata mampu memenuhi target yang ditetapkan meskipun ada beberapa yang tidak terpenuhi karena :

- Menyesuaikan dengan kebutuhan pada masa pandemi covid 19
- Realisasi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan
- Masih minimnya pemahaman OPD terhadap penyusunan draft produk hukum
- Adanya pergeseran indikator kinerja Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa : Media

Radio dan Televisi pada Dinas Kominfotik pasca adanya perubahan kelembagaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan selain mempunyai indikator kinerja utama dalam mencapai kinerja organisasi maka berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	-	-	-	-	NA	0	0	0	Merupakan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang pada RPJMD 2021 - 2026
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1,13	1,15	1,17	-	-	-	-	NA	1,13	1,15	1,17	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	98,80	98,85	98,90	-	-	-	-	NA	98,80	98,85	98,90	
4	Persentase peningkatan tempat ibadah yang representatif	-	-	-	1%	-	-	-	1,77%	-	-	-	Merupakan indikator sasaran strategis Renstra 2016-2021
5	Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Persentase pengajar agama yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
8	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	100%				100%	-	-	-	
9	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	-	-	-	100%				100%	-	-	-	
10	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100%				100%	-	-	-	
11	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	-	-	-	100%				100%	-	-	-	

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
12	Nilai SAKIP Setda	-	-	-	B	A (86)	A (87)	A (88)	A	A (86)	A (87)	A (88)	Merupakan indikator sasaran strategis Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026
13	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	-	94%	-	-	-	56,79%	-	-	-	Merupakan indikator sasaran strategis Renstra 2016-2021
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	-	-	-	BAIK	-	-	-	BAIK	-	-	-	
15	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	-	-	-	BAIK	-	-	-	SANGA T BAIK	-	-	-	
16	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	-	-	-	BAIK	-	-	-	BAIK	-	-	-	
17	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	-	-	-	BAIK	-	-	-	SANGA T BAIK	-	-	-	
18	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	-	-	-	BAIK	-	-	-	SANGA T BAIK	-	-	-	
19	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%		Merupakan indikator sasaran strategis Renstra 2021-2026
20	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	-	-	-	-	55.17%	65.52%	75.86%	-	55.17%	65.52%	75.86%	
21	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
22	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
23	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	-	-	-	-	20.69%	27.59%	34.48%	-	20.69%	27.59%	34.48%	
24	Nilai rata - rata SKM Setda	-	-	-	-	BAIK (86,00)	BAIK (87,00)	SANGAT BAIK (88,32)	-	BAIK (86,00)	BAIK (87,00)	SANGAT BAIK (88,32)	

Dari indikator kinerja tersebut diatas, berdasarkan penetapan kinerja utama perangkat daerah sesuai RPJMD Kota Blitar 2021-2026 ada 3 indikator yang harus dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan.

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung *Misi ke 1* “ Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan “, *Tujuan ke 1* “Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis“, *Sasaran ke 1* “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama” dan *Misi ke 5* “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”, *Tujuan* “ Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi “, *Sasaran ke 1* “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah“. Dimana jika target kinerja pada Sekretariat Daerah tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar yaitu Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Status EKPPD serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu–isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 1. Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah
 2. Belum Optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan

3. Belum tersusun dan tersosialisasikannya kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
 4. Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar
 5. Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 6. Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar
 7. Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 8. Belum terlaksananya identifikasi, analisis dan pemetaan produk hukum daerah
 9. Belum optimalnya pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan
- b. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
1. Belum tersusunnya peta kebijakan perekonomian Kota Blitar
 2. Belum adanya Tim Ekonomi Kota Blitar
 3. Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD
 4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
 5. Belum optimalnya pembinaan kepada pelaku pengadaan barang/jasa
 6. Belum Optimalnya pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 7. Belum tercapainya Kematangan UKPBJ level 3
 8. Kurang optimalnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. Isu terkait Administrasi Umum dan pelayanan publik
1. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan reformasi birokrasi (8 area perubahan)
 2. Belum terintegrasinya layanan pemanfaatan fasilitas ruang pertemuan dan kendaraan
 3. Belum terintegrasinya Pengelolaan layanan surat menyurat secara elektronik
 4. Kurang intensifnya pembinaan terhadap insan media massa
 5. Kurangnya pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maka perlu peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintahan, penguatan pelaksanaan otonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat
2. Dalam mewujudkan internalisasi kinerja organisasi maka perlu adanya penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi
3. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan yang baik maka perlu dilakukan :
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peta Kebijakan Daerah
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - c. Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
 - e. Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD
 - f. Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
4. Dalam meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu dilakukan penguatan pembinaan OPD penyelenggara Pelayanan Publik
5. Dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi;

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik Berbasis Teknologi Informasi;
4. Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan sumber Daya Manusia;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi; dan
6. Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, maka Sekretariat Daerah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Blitar

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				110,475,778	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				132,518,619	
I	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	57.14 %	110,475,778	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	57.14 %	132,518,619	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	18 kelurahan	110,475,778	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	18 kelurahan	132,518,619	
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	110,475,778	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	132,518,619	
II	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
A	SEKRETARIAT DAERAH					SEKRETARIAT DAERAH					
I.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	83.33 %	2,677,082,732	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	83.33 %	2,680,039,641	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %		

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	2,571,945,261	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	2,574,902,542	
			Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %		
			Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %		
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	83 %				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	83 %		
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	259,781,762	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	284,781,762	Pada tahun 2023 ada penambahan tuisi fasilitasi penerapan SPM sehingga menambah target dokumen
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	2,143,098,808	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	2,121,056,089	
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	169,064,691	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	169,064,691	
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	105,137,471	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	105,137,099	
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	8 Dokumen	105,137,471	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	8 Dokumen	105,137,099	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
		Semua Kelurahan	Kerja Sama Dalam Negeri				Semua Kelurahan	Kerja Sama Dalam Negeri			
I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	929,113,097	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	929,113,097	
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	929,113,097	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	929,113,097	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	345,859,852	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	345,859,852	
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	366,031,912	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	366,031,912	
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	217,221,333	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	217,221,333	
I.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	9,815,160,093	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	10,448,023,317	
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang	6 Rumusan Kebijakan	9,815,160,093	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang	6 Rumusan Kebijakan	10,448,023,317	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			keagamaan yang ditindaklanjuti					keagamaan yang ditindaklanjuti			
			Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan				Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan		
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	8,958,389,214	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	9,762,477,963	
1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	710,931,492	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	530,385,967	
1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	2 Dokumen	145,839,387	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	2 Dokumen	155,159,387	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
II.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	1,644,802,745	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	939,039,946	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	1,162,523,425	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	863,130,960	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	569,403,026	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	569,403,026	
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 laporan	321,022,361	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	21,838,536	
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	272,098,038	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	271,889,398	
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	482,279,320	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	75,908,986	
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	2 Dokumen	482,279,320	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	2 Dokumen	75,908,986	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			Modal, Tenaga Kerja					Modal, Tenaga Kerja			
III.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	23,569,395,721	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	24,705,483,808	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	48,346,058	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	18,346,058	
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	48,346,058	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	18,346,058	Perubahan Sub Kegiatan sesuai hasil reviu APIP dan Tim Asistensi RKA 2023
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	9,676,512,394	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	9,837,792,919	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	9,665,843,170	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	9,827,123,695	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	10,669,224	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	10,669,224	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	13,755,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	13,755,000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7,395,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7,395,000	
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6,360,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6,360,000	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	1,590,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	1,590,000	
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1,590,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1,590,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1,768,794,439	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1,951,477,463	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	80,847,374	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80,847,374	Target diubah sesuai jumlah rekening
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	129,956,688	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	210,644,428	Target diubah sesuai jumlah rekening

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	39,642,271	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	39,642,271	Target diubah sesuai jumlah rekening
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5150 Paket	612,716,920	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	744,697,180	Target diubah sesuai jumlah aktivitas
5.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	83,493,186	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	83,508,210	Target diubah sesuai jumlah rekening
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	55,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	55,000,000	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	767,138,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	737,138,000	Target sesuai dengan jumlah aktivitas
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	339,231,877	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	99,224,148	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan
6.1	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	99,414,145	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	25,655,002	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	239,817,732	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	73,569,146	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	3,185,255,504	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	4,209,258,600	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	626,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	626,000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	184,805,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1,029,928,600	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	38,445,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	30,000,000	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2,961,378,904	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3,148,704,000	Target sesuai dengan jumlah laporan penyediaan jasa perbulan dikali 13 bulan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1,083,985,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1,341,960,800	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
	Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah					
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	10,000,000	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	317,091,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	310,697,000	
8.3						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	297,393,800	Penambahan Sub Kegiatan sesuai arahan dari Tim Asistensi RKA dan kebutuhan yang wajib ada
8.4						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	30,000,000	Penambahan Sub Kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan
8.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	459,500,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	420,910,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 Unit	297,393,800	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 Unit	272,960,000	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	923,759,114	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	947,759,114	
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	178,952,314	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	178,952,314	
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	138,806,800	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	162,806,800	
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6,000,000	
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	600,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	600,000,000	
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	4,176,814,832	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	4,093,357,914	
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	4 Paket	1,903,675,967	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	4 Paket	1,892,975,967	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
		Semua Kelurahan	Daerah yang Disediakan				Semua Kelurahan	Daerah yang Disediakan			
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1,699,601,884	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1,601,569,666	
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	573,536,981	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	598,812,281	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	2,351,351,503	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	2,190,961,792	
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	1,973,602,917	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	1,858,096,559	
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	180,500,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	137,852,000	
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	197,248,586	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	195,013,233	
III.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai	1,238,914,776	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai	1,213,914,630	Sebagian anggaran digeser ke Bagian Pemerintahan sebesar Rp. 25.000.000 untuk menunjang Penerapan SPM
			Persentase PD yang memiliki IKM	27,59 %				Persentase PD yang memiliki IKM	27,59 %		

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			dengan kategori Sangat Baik					dengan kategori Sangat Baik			
			Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	65,52 %				Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	65,52 %		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	91,179,692	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	77,750,252	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	30,688,580	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	27,754,140	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	60,491,112	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	49,996,112	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	156,254,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	153,212,000	
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	55,264,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	120,814,000	Target menyesuaikan dengan kebutuhan
2.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	100,990,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	32,398,000	Anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
3	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area	22 OPD	991,481,084	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area	22 OPD	982,952,378	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			perubahan Reformasi Birokrasi					perubahan Reformasi Birokrasi			
3.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	257,146,466	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	253,338,854	
3.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	407,427,924	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	368,128,628	Target dibagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan sesuai yang harus ada berdasarkan Pemetaan KMDN 050-5889
3.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	326,906,694	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	319,145,574	Target dibagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan sesuai yang harus ada berdasarkan Pemetaan KMDN 050-5889
3.4						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	26,506,492	Sub Kegiatan baru yang harus ada berdasarkan Pemetaan KMDN 050-5889
3.5						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15,832,830	Sub Kegiatan baru yang harus ada berdasarkan

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
											Pemetaan KMDN 050-5889
II.2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	50 %	929,183,448	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	50 %	929,183,448	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	203,608,620	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	203,608,620	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	72,471,170	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	72,471,170	
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	131,137,450	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	131,137,450	
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	5 nilai	725,574,828	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	5 nilai	725,574,828	
			SKM Layanan UKPBJ	82 nilai				SKM Layanan UKPBJ	82 nilai		
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	399,049,072	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	399,049,072	
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	70,182,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	70,182,000	
2.3	Pembinaan dan Advokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	300 Orang	256,343,756	Pembinaan dan Advokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	300 Orang	256,343,756	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
	Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kelurahan	Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kelurahan	Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan capaian kinerja yang diinginkan dicapai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah :

Rencana Strategis Kementerian PANRB

Visi Kementerian PANRB Tahun 2020 – 2024 yaitu :

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia *dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong-Royong”*.

Misi Kementerian PANRB yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*
2. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Rencana Strategis Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Visi Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yaitu :

“Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Bidang Penataan Daerah, Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah, Produk Hukum Daerah, Evaluasi Kinerja dan Otsus/Istimewa”

Misi Ditjen Otonomi Daerah yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah serta Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah serta Kualitas Produk Hukum Daerah

Sedangkan jika dikaitkan dengan perencanaan tahunan Pemerintah Pusat maka Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan mengusung tema “*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 membahas tiga isu utama, yaitu Penanganan Pandemi COVID – 19, Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023; dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun Anggaran (TA) 2023. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Dan guna mencapai arah kebijakan secara nasional tersebut maka sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
(Renstra Tahun 2021 – 2026)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN	
				2022	2023
	TUJUAN:				
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80.00	83.60	83.70
	SASARAN:				
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%
	TUJUAN:				
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (72,06)	BB (72,15)	BB (72,20)
	SASARAN:				
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	34.48%	55.17%	65.52%
	TUJUAN:				
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi (3,3532)
	SASARAN:				
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%
	TUJUAN:				
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,39)	BAIK (83,00)	BAIK (83,50)
	SASARAN:				

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN	
				2022	2023
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	10.34%	20.69%	27.59%
		Nilai rata - rata SKM Setda		BAIK (86,00)	BAIK (87,00)
	TUJUAN:				
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,99)	A (86)	A (87)
	SASARAN:				
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	A (83,99)	A (86)	A (87)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota Blitar.

2. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tahun 2023 adalah tahun Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan tema: PENINGKATAN Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional Berbasis Teknologi Informasi. Normalisasi ekonomi daerah dimaksud adalah normalisasi ekonomi sebagai dampak pandemi. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 : Memantapkan Pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Pada tahun ini, arah kebijakan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur sama-sama menekankan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung tercapainya tema pembangunan 2023, menyusun rencana kerja tahun 2023 dan menguraikan dalam 4 (empat) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 64 (enam puluh empat)

sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 41.977.316.506,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam rupiah) yang berasal dari APBD Kota Blitar.

Adapun secara garis besar uraian mengenai rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 yang diturunkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta proyeksi tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				132,518,619	APBD			
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Kota Blitar	57.14 %	132,518,619	APBD		57.14 %	105,644,412
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Kota Blitar	18 kelurahan	132,518,619	APBD		18 kelurahan	105,644,412
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Dokumen	132,518,619	APBD		21 Dokumen	105,644,412
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Kota Blitar	83.33 %	2,680,039,641	APBD		100 %	3,063,032,976
						Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Kota Blitar	100 %	2,574,902,542	APBD		100 %	2,958,032,976
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi		100 %				100 %	
						Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 %				100 %	
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan		83 %				83 %	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	284,781,762	APBD	Pada tahun 2023 ada penambahan tusi fasilitasi penerapan SPM sehingga menambah target dokumen	10 Dokumen	297,548,226
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	2,121,056,089	APBD		5 Dokumen	2,475,484,750
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	169,064,691	APBD		4 Dokumen	185,000,000
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.33 %	105,137,099	APBD		83.33 %	105,000,000
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	105,137,099	APBD		8 Dokumen	105,000,000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Kota Blitar	100 %	929,113,097	APBD		100 %	1,059,060,700
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Kota Blitar	100 %	929,113,097	APBD		100 %	1,059,060,700
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320 Dokumen	345,859,852	APBD		320 Dokumen	371,928,400
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kasus	366,031,912	APBD		4 Kasus	431,233,400
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Dokumen	217,221,333	APBD		70 Dokumen	255,898,900
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	10,448,023,317	APBD		100 %	9,290,663,800
						Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	10,448,023,317	APBD		6 Rumusan Kebijakan	9,290,663,800

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		4 Rumusan Kebijakan				4 Rumusan Kebijakan	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	9,762,477,963	APBD		25 Dokumen	8,501,133,700
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	530,385,967	APBD		2 Dokumen	683,542,100
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	155,159,387	APBD		2 Dokumen	105,988,000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	939,039,946	APBD		100 %	565,380,400
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	863,130,960	APBD		6 Rumusan Kebijakan	483,130,400
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	569,403,026	APBD		2 Dokumen	205,360,500

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	21,838,536	APBD		2 Laporan	28,161,700
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	271,889,398	APBD		4 Dokumen	249,608,200
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	2 dokumen	75,908,986	APBD		2 dokumen	82,250,000
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	75,908,986	APBD		2 Dokumen	82,250,000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Kota Blitar	100 %	24,705,483,808	APBD		100 %	24,453,701,100
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik (79- 84) Nilai				Baik (79- 84) Nilai	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	18,346,058	APBD		100 %	19,000,000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	18,346,058	APBD	Perubahan Sub Kegiatan sesuai hasil reviu APIP dan Tim Asistensi RKA 2023	1 Laporan	19,000,000
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Kota Blitar	100 %	9,837,792,919	APBD		100 %	9,941,335,900

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						perangkat daerah sesuai standar							
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang/ bulan	9,827,123,695	APBD		84 Orang/ bulan	9,930,400,000
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	10,669,224	APBD		4 Laporan	10,935,900
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Kota Blitar	100 %	13,755,000	APBD		100 %	13,076,000
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	7,395,000	APBD		2 Dokumen	6,576,000
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	6,360,000	APBD		2 Laporan	6,500,000
4	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Kota Blitar	100 %	1,590,000	APBD		100 %	1,644,000
4	1	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,590,000	APBD		1 Dokumen	1,644,000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	1,951,477,463	APBD		100 %	1,639,650,000
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	80,847,374	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	1 Paket	79,500,000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	7 Paket	210,644,428	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	7 Paket	238,500,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Semua Kelurahan						
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	39,642,271	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	3 Paket	31,800,000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 Paket	744,697,180	APBD	Target diubah sesuai jumlah aktivitas	170 Paket	516,500,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	83,508,210	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	2 Paket	77,650,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	55,000,000	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun	24 Dokumen	47,400,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Laporan	737,138,000	APBD	Target sesuai dengan jumlah aktivitas	130 Laporan	648,300,000
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	99,224,148	APBD	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan	100 %	90,000,000
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	25,655,002	APBD		4 Unit	50,000,000
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	73,569,146	APBD		7 Unit	40,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	4,209,258,600	APBD		100 %	4,270,451,400
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	626,000	APBD		1 Laporan	600,000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	1,029,928,600	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun	48 Laporan	1,182,000,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	30,000,000	APBD		6 Laporan	81,714,900
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	3,148,704,000	APBD	Target sesuai dengan jumlah laporan penyediaan jasa perbulan dikali 13 bulan	13 Laporan	3,006,136,500
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	1,341,960,800	APBD		100 %	1,748,193,800
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	10,000,000	APBD		2 Unit	10,000,000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Unit	310,697,000	APBD		65 Unit	347,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	297,393,800	APBD	Penambahan Sub Kegiatan sesuai arahan dari Tim Asistensi RKA dan kebutuhan yang wajib ada	40 Unit	300,000,000
4	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	30,000,000	APBD	Penambahan Sub Kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan	1 Unit	30,000,000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	420,910,000	APBD		4 Unit	763,800,000
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	272,960,000	APBD		40 Unit	297,393,800
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	100 %	947,759,114	APBD		100 %	930,350,000
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	178,952,314	APBD		2 Orang/ Bulan	179,000,000
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Paket	162,806,800	APBD		23 Paket	145,350,000
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	6,000,000	APBD		2 Orang	6,000,000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	600,000,000	APBD		2 Orang/ Bulan	600,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Kota Blitar	100 %	4,093,357,914	APBD		100 %	3,800,000,000
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1,892,975,967	APBD		4 Paket	1,900,000,000
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1,601,569,666	APBD		4 Paket	1,400,000,000
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	598,812,281	APBD		12 Paket	500,000,000
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Kota Blitar	80 %	2,190,961,792	APBD		80 %	2,000,000,000
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Laporan	1,858,096,559	APBD		33 Laporan	1,800,000,000
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Laporan	137,852,000	APBD		400 Laporan	100,000,000
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3055 Laporan	195,013,233	APBD		3055 Laporan	100,000,000
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	Baik (79-84) Nilai	1,213,914,630	APBD	Sebagian anggaran digeser ke Bagian Pemerintahan sebesar Rp. 25.000.000 untuk menunjang Penerapan SPM	Baik (79-84) Nilai	1,442,317,093

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik		27,59 %				34,48 %	
						Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi		65,52 %				75,86 %	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	Kota Blitar	100 %	77,750,252	APBD		100 %	101,600,000
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	27,754,140	APBD		10 Dokumen	49,000,000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	49,996,112	APBD		6 Laporan	52,600,000
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Kota Blitar	100 %	153,212,000	APBD		100 %	152,717,093
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	120,814,000	APBD	Target menyesuaikan dengan kebutuhan	7 Paket	60,000,000
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang	32,398,000	APBD	Anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan	84 Orang	92,717,093
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar	22 OPD	982,952,378	APBD		24 OPD	1,188,000,000
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	253,338,854	APBD		6 Dokumen	261,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	368,128,628	APBD	Target dibagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan sesuai yang harus ada berdasarkan Pemetaan KMDN 050-5889	5 Laporan	438,000,000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	319,145,574	APBD	Target dibagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan sesuai yang harus ada berdasarkan Pemetaan 4KMDN 050-5889	3 Dokumen	374,000,000
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	26,506,492	APBD	Sub Kegiatan baru yang harus ada berdasarkan Pemetaan KMDN 050-5889	3 Dokumen	100,000,000
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	15,832,830	APBD	Sub Kegiatan baru yang harus ada berdasarkan Pemetaan KMDN 050-5889	2 Dokumen	15,000,000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Kota Blitar	50 %	929,183,448	APBD		63,33 %	1,165,983,600
						Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	10 bahan kebijakan	203,608,620	APBD		10 bahan kebijakan	345,983,600
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	6 dokumen	72,471,170	APBD		6 dokumen	71,983,600

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Semua Kelurahan						
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	131,137,450	APBD		16 Laporan	274,000,000
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Kota Blitar	5 nilai	725,574,828	APBD		6 nilai	820,000,000
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 nilai 80 Dokumen	399,049,072	APBD		82,5 nilai 80 Dokumen	446,000,000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	70,182,000	APBD		2 Dokumen	52,000,000
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	256,343,756	APBD		300 Orang	322,000,000

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar, difokuskan pada pencapaian target-target indikator melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan :
 - a. Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi dalam mengumpulkan data kelengkapan pengajuan penerbitan Produk Hukum serta penyusunan draft produk hukum.
 - b. Menyusun SOP Pengajuan Penerbitan Produk Hukum dan optimalisasi pelaksanaannya.
 - c. Peningkatan kapasitas Perancang Undang-Undang melalui Diklat, Bimtek Perancang Undang-Undangpertentangan.
2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Pemerintahan Umum :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait yang mengampu urusan Pemerintahan Umum.
 - b. Menyusun kebijakan yang bersifat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh OPD yang melaksanakan urusan dibawah koordinator Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan OPD pengganti pelaksana pengelolaan anggaran dari DBHCHT sesuai dengan PMK Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau guna pemanfaatan yang lebih optimal.
4. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Administrasi Pembangunan :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait guna penyusunan rumusan kebijakan yang tepat sasaran.
 - b. Meningkatkan pembinaan kepada OPD/Unit Kerja terkait Administrasi Pembangunan sehingga bisa meningkatkan persentase OPD kategori tertib administrasi pembangunan.
5. Nilai SAKIP SETDA minimal B :
 - a. Melaksanakan review atas tugas dan fungsi guna pelaksanaan yang lebih efektif.

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
 - c. Perlu komitmen bersama serta pemahaman yang lebih mendalam terkait SAKIP dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga bisa menjadikan SAKIP adalah kebutuhan dan bukan kewajiban saja
6. Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement:
- a. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa serta melaksanakan monitoring perubahan perubahannya.
 - b. Melaksanakan koordinasi yang intensif serta langkah-langkah yang efektif juga menyusun peta jalan (roadmap) guna pencapaian Kelembagaan UKPBJ level 3 atau level proaktif.
7. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan Sekretariat Daerah :
- a. Melaksanakan peningkatan kompetensi petugas pelayanan dengan mengikuti Bimbingan Teknis terkait pelayanan.
 - b. Melaksanakan pembinaan implementasi SOP berikut peningkatan kualitas layanan
 - c. Menata kembali SDM dengan merencanakan adanya petugas khusus penanganan pengaduan.
 - d. Melaksanakan Bimtek Keprotokolan kepada perwakilan OPD/Unit Kerja guna peningkatan pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar ini, tidak hanya sekedar memenuhi amanat dan menggugurkan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, namun diharapkan memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan, serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2023. Renja Sekretariat Daerah ini juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2023 yang dalam penyusunannya mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2022.

Selanjutnya Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini digunakan sebagai dasar acuan dalam memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta nantinya dipergunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Dalam Renja Sekretariat Daerah ini program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif dimana dalam pelaksanaannya masih harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia, serta guna mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Disamping kemampuan anggaran, dalam renja ini telah ditetapkan target dan capaian kinerja. Namun guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada baik di lingkungan internal dan eksternal OPD, target dan capaian kinerja tersebut dapat dilakukan review dan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang ada serta terhadap pengalokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud.

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2023 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari

sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.